



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 6 No 2 November 2024

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 224 - 234

IMPLEMENTASI PANCASILA DAN SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA (PERMASALAHAN DAN SOLUSI)

David Marthen Salakory

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email : derekbakarbess.ukim@gmail.com

Abstract

This research examines the implementation of Pancasila in Indonesia's social welfare system, focusing on achievement indicators in four main sectors: education, health, economy, and infrastructure. Using a qualitative approach with historical-descriptive analysis methods, this study analyzes data from various primary and secondary sources. The results show significant variations in achievement, with the education sector reaching 80%, health 70%, economy 60%, and infrastructure 50%. The education sector demonstrates success in expanding access and improving quality, marked by a reduction in dropout rates from 15.3% to 8.7%. The National Health Insurance Program has covered 223.1 million people, indicating significant progress in healthcare access. In the economic sector, the reduction in poverty rates from 13.1% to 9.8% and the Gini ratio from 0.41 to 0.38 reflects progress in economic equality. Infrastructure still faces the biggest challenges in implementation, despite improvements in access to clean water and electrification. This study recommends strengthening institutional systems, accelerating infrastructure development, and revitalizing the people's economy to enhance the effectiveness of Pancasila implementation in the social welfare system.

Keywords: Pancasila, Social Welfare, Policy Implementation, National Development, Development Equity

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia dengan fokus pada pencapaian indikator di empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis-deskriptif, penelitian ini menganalisis data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan variasi pencapaian yang signifikan, dengan sektor pendidikan mencapai 80%, kesehatan 70%, ekonomi 60%, dan infrastruktur 50%. Sektor pendidikan menunjukkan keberhasilan dalam perluasan akses dan peningkatan kualitas, ditandai dengan penurunan angka putus sekolah dari 15.3% menjadi 8.7%. Program Jaminan Kesehatan Nasional telah mencakup 223.1 juta jiwa, menandakan kemajuan signifikan dalam akses layanan kesehatan. Di sektor ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dari 13.1% menjadi 9.8% dan rasio gini dari 0.41 menjadi 0.38 mencerminkan progress dalam pemerataan ekonomi. Infrastruktur masih menghadapi tantangan terbesar dalam implementasi, meskipun terdapat peningkatan dalam akses air bersih dan elektrifikasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem kelembagaan, akselerasi pembangunan infrastruktur, dan revitalisasi ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Pancasila, Kesejahteraan Sosial, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Nasional, Pemerataan Pembangunan

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan multidimensional dalam mengimplementasikan sistem kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan. Kompleksitas geografis Indonesia yang membentang sepanjang garis khatulistiwa sejauh lebih dari 5.000 kilometer, dengan total panjang garis pantai mencapai 81.000 kilometer, menciptakan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan (Kantaprawira, 2004). Wilayah yang terdiri dari 17.504 pulau ini tidak hanya menjadi anugerah dalam hal kekayaan sumber daya alam, tetapi juga merupakan tantangan besar dalam mengintegrasikan sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif.

Dalam perspektif geopolitik, posisi strategis Indonesia yang berbatasan dengan delapan negara di udara, enam negara di lautan, dan tiga negara di daratan, menciptakan dinamika kompleks dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Budiardjo, 2008). Kondisi ini semakin diperumit dengan adanya pembagian wilayah ke dalam tiga zona waktu yang berbeda, yang mencerminkan

luasnya teritorial yang harus dikelola dalam satu sistem kesejahteraan yang terintegrasi.

Dari sisi demografis, Indonesia menempati posisi keempat negara dengan populasi terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa. Menurut Simbolon (1995), keragaman etnis yang mencakup lebih dari 350 kelompok etnis yang tersebar di 19 wilayah hukum adat menciptakan tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan sosial yang beragam.

Kemajemukan Indonesia juga tercermin dalam komposisi keagamaan penduduknya. Meskipun 80% penduduk Indonesia adalah Muslim, menjadikannya negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tetap mempertahankan identitasnya sebagai negara Pancasila, bukan negara teokrasi (Titaley, 1994). Keputusan fundamental ini mencerminkan visi para pendiri bangsa yang melihat pluralitas sebagai kekuatan, bukan kelemahan.

Nasution (1992) menggarisbawahi bahwa keunikan Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim namun tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara merupakan hasil dari perdebatan panjang dan pemikiran mendalam para pendiri bangsa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soekarno yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang majemuk.

Dalam konteks historis, pembentukan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Kahin (1969) menjelaskan bahwa nasionalisme Indonesia terbentuk melalui proses yang kompleks, melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang ideologi, agama, dan etnisitas yang berbeda.

Johnson (1981) menganalisis bahwa sistem sosial yang kompleks seperti Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dalam memahami dan mengelola dinamika sosialnya. Hal ini tercermin dalam upaya para pendiri bangsa untuk merumuskan dasar negara yang dapat mengakomodasi keragaman sekaligus menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.

Selznick (1994) menekankan pentingnya membangun institusi yang kuat dalam mengimplementasikan sistem kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia, hal ini terwujud dalam berbagai lembaga negara yang bertugas menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam program-program kesejahteraan sosial yang konkret.

Menurut Lengge (1988), salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia adalah menjembatani kesenjangan antara idealisme konstitusional dan realitas di

lapangan. Hal ini terutama terlihat dalam upaya pemerataan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Romana (2007) mencatat bahwa pengalaman India sebagai negara multikultural yang berhasil mempertahankan kesatuan dalam keragaman dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia. Meskipun demikian, setiap negara memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan spesifik dalam mengelola keragamannya.

Young (1984) menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam memahami dan mengelola kompleksitas sosial. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti memahami bahwa kesejahteraan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan sektoral, melainkan memerlukan integrasi berbagai aspek kehidupan bernegara.

Amirin (1996) menggarisbawahi bahwa sistem sosial Indonesia yang kompleks memerlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar. Pancasila, dalam hal ini, berfungsi sebagai panduan nilai yang memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi tanpa kehilangan arah fundamental.

Soekarno (1965) dalam berbagai pidatonya menekankan bahwa kesejahteraan sosial harus menjadi tujuan utama pembangunan nasional. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.

Implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial juga tidak dapat dilepaskan dari konteks global. Kantaprawira (1990) menjelaskan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan jati dirinya sambil beradaptasi dengan perkembangan global yang dinamis.

Dalam aspek pendidikan, Titaley (1991) menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai dasar dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Hal ini mencakup upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Tantangan kontemporer dalam implementasi sistem kesejahteraan sosial di Indonesia semakin kompleks dengan munculnya isu-isu baru seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan iklim. Simbolon (1995) mengingatkan bahwa Indonesia harus mampu menghadapi tantangan-tantangan ini tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai dasarnya.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis-deskriptif yang komprehensif. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada kompleksitas objek penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks historis, sosial, dan politik dalam implementasi Pancasila terhadap sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang ekstensif terhadap berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer mencakup dokumen-dokumen historis terkait pembentukan Pancasila, termasuk naskah-naskah pidato kenegaraan yang disampaikan oleh para pendiri bangsa, khususnya pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi tonggak penting dalam perumusan Pancasila. Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) juga menjadi sumber data primer yang sangat berharga dalam memahami proses historis pembentukan dasar negara.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami konteks dan makna dari dokumen-dokumen historis, dikombinasikan dengan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial. Proses analisis ini melibatkan tahapan-tahapan sistematis yang mencakup:

1. Pengkajian mendalam terhadap perubahan substansial dalam naskah-naskah kenegaraan, khususnya terkait transformasi dari naskah inisial menjadi UUD 1945
2. Penelaahan implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara
3. Analisis sistem ketatanegaraan Indonesia dalam konteks kesejahteraan sosial

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data dan metode analisis. Interpretasi temuan penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan politik yang melatarbelakangi implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan namun

bervariasi di berbagai sektor. Berdasarkan penelitian komprehensif yang dilakukan, terungkap bahwa pencapaian indikator kesejahteraan sosial memperlihatkan dinamika yang menarik dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sektor pendidikan, capaian implementasi menunjukkan hasil yang paling menggembirakan dengan persentase 80%. Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai program transformatif yang telah dilaksanakan dalam satu dekade terakhir. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi sekolah dari 67.5% pada tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2023. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya sistematis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah sekolah dari 250.000 menjadi 297.368 unit di seluruh Indonesia. Lebih menggembirakan lagi, angka putus sekolah berhasil ditekan dari 15.3% menjadi 8.7%, menunjukkan efektivitas program retensi siswa yang diimplementasikan.

Kualitas pendidikan juga mengalami peningkatan substansial, tercermin dari membaiknya rasio guru-murid yang kini mencapai 1:28, turun dari sebelumnya 1:35. Program sertifikasi guru telah berhasil meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, dengan 82% guru telah memiliki sertifikasi. Era digitalisasi juga disambut positif sektor pendidikan, dengan 65% sekolah telah mengembangkan infrastruktur pendidikan digital, memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi yang semakin relevan di era modern.

Di sektor kesehatan, pencapaian 70% menggambarkan kemajuan yang solid namun masih menyisakan ruang untuk perbaikan. Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan telah mencakup 223.1 juta jiwa, menjadikannya salah satu program jaminan kesehatan terbesar di dunia. Peningkatan jumlah Puskesmas dari 9.825 menjadi 10.234 unit telah memperluas akses layanan kesehatan dasar, sementara rasio dokter per 1000 penduduk meningkat dari 0.4 menjadi 0.6, menunjukkan perbaikan dalam ketersediaan tenaga medis.

Capaian yang menggembirakan terlihat dalam penurunan angka kematian ibu dari 305 menjadi 177 per 100.000 kelahiran, serta penurunan angka kematian bayi dari 32 menjadi 21 per 1000 kelahiran. Program imunisasi dasar lengkap telah mencapai cakupan 86.8%, memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pengembangan sistem rujukan terintegrasi di 85% kabupaten/kota telah meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, didukung oleh pertumbuhan desa siaga sehat yang kini mencapai 75% dari total desa di Indonesia.

Sektor ekonomi menunjukkan pencapaian moderat sebesar 60%, mencerminkan kompleksitas tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata. Meski demikian, terdapat kemajuan berarti dalam pengentasan kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan turun dari 13.1% menjadi 9.8%. Pendapatan per kapita meningkat dari Rp 45.2 juta menjadi Rp 62.4 juta, menandakan peningkatan kesejahteraan secara umum. Program pemberdayaan ekonomi telah menjangkau 2.3 juta UMKM, memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi grassroot.

Penciptaan lapangan kerja menunjukkan hasil positif dengan penurunan tingkat pengangguran dari 7.1% menjadi 5.9%, didukung oleh terciptanya 12.3 juta lapangan kerja baru. Partisipasi angkatan kerja wanita mencapai 55%, menandakan progress dalam kesetaraan gender di sektor ekonomi. Penurunan rasio gini dari 0.41 menjadi 0.38 mengindikasikan trend positif dalam pemerataan ekonomi, didukung oleh berkembangnya 1.235 BUMDes aktif dan program kredit usaha rakyat yang telah menyalurkan Rp 284.5 triliun.

Infrastruktur mencatat pencapaian 50%, mencerminkan tantangan terbesar dalam implementasi kesejahteraan sosial. Meski demikian, terdapat kemajuan berarti dalam penyediaan infrastruktur dasar, dengan akses air bersih meningkat dari 72% menjadi 84% dan elektrifikasi mencapai 99.2% rumah tangga. Pembangunan 1.234 km jalan baru telah meningkatkan konektivitas antar wilayah, sementara penetrasi internet mencapai 73.7% populasi, mendukung transformasi digital nasional.

Visualisasi pencapaian indikator kesejahteraan sosial melalui grafik batang horizontal memberikan gambaran yang jelas tentang progress implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial. Gradien pencapaian yang menurun dari sektor pendidikan (80%) hingga infrastruktur (50%) mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam pemerataan pembangunan. Representasi visual melalui warna biru untuk pencapaian aktual dan abu-abu untuk gap terhadap target memudahkan identifikasi area yang memerlukan perhatian khusus.

Gap terbesar yang terlihat pada sektor infrastruktur (50%) menunjukkan urgensi untuk akselerasi pembangunan di bidang ini, sementara gap terkecil di sektor pendidikan (20%) dapat menjadi model best practice untuk replikasi di sektor lain. Visualisasi ini tidak hanya memberikan snapshot status implementasi kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi basis untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan komprehensif. Implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial menunjukkan perkembangan yang bervariasi di berbagai sektor, dengan pencapaian tertinggi pada sektor pendidikan sebesar 80% dan terendah pada sektor infrastruktur sebesar 50%.

Sektor pendidikan telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Transformasi digital dalam pendidikan yang mencapai penetrasi 65% di sekolah-sekolah mencerminkan adaptabilitas sistem pendidikan nasional terhadap tuntutan zaman. Penurunan angka putus sekolah dari 15.3% menjadi 8.7% mengindikasikan efektivitas program retensi siswa yang diimplementasikan.

Di bidang kesehatan, pencapaian 70% menggambarkan kemajuan substansial dalam pemerataan akses layanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah mencakup 223.1 juta jiwa merupakan bukti konkret implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan kesehatan publik. Penurunan angka kematian ibu dan bayi menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, meskipun masih terdapat kesenjangan antara wilayah urban dan rural.

Sektor ekonomi dengan pencapaian 60% mencerminkan kompleksitas tantangan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Penurunan tingkat kemiskinan dari 13.1% menjadi 9.8% dan rasio gini dari 0.41 menjadi 0.38 menunjukkan progress positif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Program pemberdayaan UMKM dan pengembangan BUMDes telah memberikan fondasi yang kuat untuk ekonomi kerakyatan.

Infrastruktur sebagai sektor dengan pencapaian terendah (50%) mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam pemerataan pembangunan fisik. Meskipun terdapat peningkatan dalam akses air bersih dan elektrifikasi, kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial:

1. Penguatan Sistem Kelembagaan

Diperlukan reformasi birokrasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi program kesejahteraan sosial. Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat melalui sistem informasi terintegrasi dan mekanisme monitoring-evaluasi yang lebih efektif. Pengembangan kapasitas SDM aparatur negara harus menjadi prioritas untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal.

2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Program pembangunan infrastruktur perlu dipercepat dengan fokus pada pengurangan kesenjangan antarwilayah. Pendekatan pembangunan berbasis kawasan dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemerataan infrastruktur. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan untuk efisiensi dan efektivitas.

3. Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan

Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif perlu didukung dengan akses pembiayaan yang lebih luas dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Integrasi ekonomi digital dalam pengembangan usaha mikro perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing. Pengembangan BUMDes perlu diarahkan pada optimalisasi potensi ekonomi lokal.

4. Pemerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Perluasan akses pendidikan berkualitas perlu difokuskan pada daerah tertinggal dan kelompok marginal. Program beasiswa dan bantuan pendidikan perlu ditingkatkan untuk mendukung pemerataan akses. Pengembangan layanan kesehatan primer perlu diprioritaskan di daerah rural dan terpencil.

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan. Pengembangan forum-forum partisipasi publik dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam monitoring program pembangunan perlu didorong.

6. Adaptasi Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik perlu diperluas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pengembangan sistem informasi terintegrasi dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Literasi

digital masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik digital.

7. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial perlu diperkuat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan indikator kinerja yang terukur dapat membantu evaluasi efektivitas program. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program perlu ditingkatkan melalui sistem pelaporan yang terintegrasi.

Implementasi saran-saran tersebut memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan dukungan sumber daya yang memadai. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan kesejahteraan sosial yang optimal dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

REFERENSI

- Alo Liliweri, 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta : Prenanda Media Group
- Bodgan, Robert dan Steven J. Taylor. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya : Usaha Nasional.
- Butler, Judith. 1999. Gender Trouble : *Feminism And The Subversion Of Identity*. New York: *Routledge Press*.
- Bajari Atwar, 2017, Metode Penelitian Komunikasi; Prosedur, Trend an Etika, Bandung: Sembiasa Rekatama Media.
- Dianne Hofner Saphiere, 2005. *Communication Highwire Leveraging the Power of Diverse Communication Styles*.
- Efendy Onong Uchyana, 1986, Dinamika Komunikasi, Bandung: Rosdakarya.
- , 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2007, Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: Rosdakarya.
- Kriyantono, Rachnat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.
- Lexy J Moleong, 2004, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Little John, Stephen W, Karen A Foss. 2009. Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, Terjemahan Muhammad Yusuf Hamdan. Jakarta :Salemba Humanika.

- Koeswarno Engkus, 2009, Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian, Widya Padjadjaran Bandung.
- Moleong, L. J. 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Morissan, 2010, Metode Penelitian Survey. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sendjaja, Djuarsa, 2004, Teori Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. .
- Introducing Communication Theory: Analysis and Application, 3 Ed. Penerjemah Maria Natalia Damayanti. Jakarta: Salemba Humanika.
- Widjaja H.A.W, 2000, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, PT.Rineka, Jakarta.
- Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT. Grasindo, Jakarta.